

**KOORDINASI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  
DAN SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN AKSI  
BALAP LIAR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022-2023**

**Oleh : Monica**

**Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Aksi balap liar telah menjadi permasalahan serius yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koordinasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, dalam menangani aksi balap liar. Lokasi Penelitian di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Harold Knootz dan Cyril O' Donnel terdapat 4 indikator, yaitu kerja sama, pertemuan rapat, komunikasi yang baik dan pembagian tugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta, dan DPRD Kota Pekanbaru dalam penanganan aksi balap liar cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin dan patroli gabungan. DPRD berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendorong pengesahan peraturan daerah yang lebih ketat serta alokasi anggaran khusus untuk penanganan masalah ini. Selain itu, upaya preventif seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampanye keselamatan berlalu lintas juga menjadi fokus utama. Edukasi yang diberikan kepada pelajar di berbagai sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah dan instansi terkait mampu menciptakan langkah-langkah strategis dalam menekan angka balap liar di Kota Pekanbaru. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan frekuensi rapat koordinasi, pelibatan lebih banyak pihak dalam sosialisasi, serta pengembangan teknologi pemantauan yang lebih canggih untuk mendukung upaya penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Kerja sama, Komunikasi, Pertemuan Rapat, Pembagian Tugas

**ABSTRACT**

*The illegal street racing action has become a serious problem that interferes with public order and threatens the safety of the people of the new Monday. The study aims to review coordination between local governments, in this case the new appellation service, the new pekansta polresta, and the regional people's representative council (DPRD) of the new pekand. The research site of a new pekanbaru city. The study USES the theory of coordination presented by Harold knootz and Cyril o 'donnel as four indicators of cooperation, meeting, good communication and task division. The study USES a*

*descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documenting.*

*Studies have shown that coordination between the nexus service, the Polresta department, and the new pekanbaru city in the handling of illegal street racing is quite effective, although several challenges remain. Coordination is carried out through regular meetings and combined patrols. The DPRD has taken an active role in implementing public aspirations and encouraging more strict zoning regulations and specific budget allocations for handling the problem. Furthermore, preventive efforts such as schools socialization and cross-country safety campaigns are also a major focus. Education given to students in various schools is expected to increase awareness of the dangers of wild racing and the importance of obeying traffic rules.*

*Keywords: cooperation, communication, meeting, task division*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Aksi balap liar di Kota Pekanbaru merupakan masalah serius yang sangat mengganggu bagi masyarakat setempat. Fenomena ini telah membuat keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru menjadi terganggu. Pada tahun 2022, aksi balap liar ini berjumlah 393 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus aksi balap liar yang mencapai 617 kasus. Dalam menghadapi masalah ini, koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi faktor kunci untuk menghasilkan langkah-langkah penanganan yang efektif.

Pada bulan Juni tahun 2023 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Pekanbaru menggelar *Focus Grup Discussion* (FGD). Forum ini bertujuan untuk menekan aksi balapan liar di Kota Pekanbaru. Forum diskusi kali ini diprakarsai oleh Satlantas Polresta Pekanbaru beserta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Pekanbaru yakni bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Jajaran Polresta Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa saja permasalahan yang ada di luar sehingga mencapai kesepakatan bersama untuk sama-sama menekan aksi balap liar yang memang

mayoritas pelakunya banyak dari usia muda atau kalangan pelajar.

Aksi Balap liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 115 huruf b yang menyatakan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa kasus aksi balap liar ini bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Hal ini bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia yang merujuk pada kondisi sosial dan perilaku masyarakat yang teratur, aman, dan harmonis. Ini mencakup segala hal mulai dari kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, serta penghindaran konflik dan gangguan dalam masyarakat. Kebijakan mengenai Ketertiban Umum ini diatur di dalam pasal 12 Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar<sup>1</sup>.

Setiap bulan belasan sepeda motor terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Lalu lintas (Satlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Berikut ini adalah jumlah penangkapan kasus aksi balap liar di Kota Pekanbaru yang telah peneliti dapatkan:

**Tabel 1.1 Kasus Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

Bulan	Jumlah Kasus Per Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Januari	13	40	24	53
Februari	14	15	38	46
Maret	5	-	18	60
April	8	-	31	36
Mei	6	13	26	29
Juni	2	26	19	67
Juli	-	25	27	44
Agustus	1	17	45	28
September	2	22	32	49
Oktober	1	20	43	59
November	2	5	34	61
Desember	-	47	56	85
Jumlah	117	203	393	617

Sumber: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kasus aksi balap liar di tahun 2021-2023 tergolong cukup tinggi. Hal ini dibuktikan ada lebih 100 kasus setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji fenomena aksi balap liar yang sering terjadi di Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Diponegoro, Jalan Stadion Utama Riau,

Jalan Badak Kulim Kantor Walikota Baru, dan Jalan Arifin Ahmad. Berdasarkan tabel tersebut bahwa aksi balap liar ini sangat mengganggu keamanan masyarakat, karena masyarakat yang melintas di jalan raya akibat kegiatan aksi balap liar ini akan terkena imbasnya, begitu juga dengan lingkungan sekitar. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yakni Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang/badan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak dan mengotori jalan, jalur hijau sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, dikecualikan bagi kepentingan umum dan izin walikota.

Peran instansi pemerintahan dalam penanganan kasus aksi balap liar merupakan kunci dalam menangani kasus ini. Koordinasi sangat diperlukan dalam menangani kasus ini. Dalam hal ini, aktor-aktor yang berperan penting dalam menangani kasus balap liar di Pekanbaru ialah Satlantas Polresta Pekanbaru dengan menggandeng Dinas perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun peran dari kedua instansi tersebut dalam penanganan aksi balap liar ini yaitu :

1. Satlantas Polresta Pekanbaru  
Satlantas Polresta Pekanbaru memiliki peran sangat penting dalam penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru. Satlantas Polresta Pekanbaru berperan sebagai penegak hukum dan pengawas lalu lintas yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Satlantas siap untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku balap liar, termasuk tilang, penahanan kendaraan, atau proses hukum lebih lanjut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada

<sup>1</sup> Suhendi, D. (2019, Maret). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Jurnal Tatapamong, 35-47.

pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Contoh nyatanya adalah melakukan sosialisasi mengenai aksi balap liar.

2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur lalu lintas di kota Pekanbaru dengan merancang jalur lalu lintas yang aman dan efisien, mereka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya aksi balap liar di jalan-jalan kota. Peran Dinas Perhubungan dalam penanganan aksi balap liar adalah untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung keselamatan berlalu lintas, mengawasi dan menegakkan peraturan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya aksi tersebut. Contoh nyatanya adalah Dinas Perhubungan memasang marka pita penghaduh sebagai tindakan preventif di lokasi aksi balap liar.

Dengan Kerjasama dan koordinasi yang erat antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus aksi balap liar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di kota tersebut. Namun, pada tahun 2022-2023 kasus aksi balap melonjak naik menjadi 1.010 Kasus. Hal ini menandakan bahwa koordinasi antar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal.

Adapun fenomena masalah yang penulis temui adalah:

1. Pada tahun 2022 aksi balap liar ini berjumlah 393 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus aksi balap liar yang mencapai 617 kasus. Kasus aksi balap liar yang mengganggu ketertiban umum masyarakat berdasarkan data kasus pada tahun 2022-2023.

2. Proses koordinasi pemerintah Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. dalam penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan yang akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi pemerintah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta dalam Penanganan Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.
2. Apa faktor penghambat dalam penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan koordinasi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dalam Penanganan Aksi Balap liar di Kota Pekanbaru pada Tahun 2022-2023.
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru pada Tahun 2022-2023.

#### **Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai Koordinasi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dalam Penanganan Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru.
- b. Secara Praktis, penelitian ini menjadi informasi bagi masyarakat tentang koordinasi pemerintah antara Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Penanganan Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini

terkait dan dapat dijadikan bahan masukan

## 2. TINJAUAN TEORI

### **Koordinasi**

Koordinasi adalah pengaturan dan penyesuaian aktivitas antara berbagai instansi pemerintah serta antara pemerintah dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, koordinasi memainkan peran penting untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi pemerintah dapat bekerja secara sinkron dan tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kebijakan yang saling bertentangan.

### **Balap Liar**

Balap Liar adalah jenis perilaku kenakalan yang membahayakan diri sendiri dan mengganggu arus lalu lintas baik bagi mereka maupun orang lain. Secara umum, balap liar mengikuti peraturan seperti *drag bike*, yang melibatkan dua sepeda motor yang dikendarai sepanjang trek 201 meter.

### **Kerja sama**

Kerja sama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan untuk mengurangi aksi balap liar seperti melakukan kegiatan patroli gabungan, penataan infrastruktur, penyuluhan, dan menerima pengaduan masyarakat.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Untuk mengatasi balap liar, Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta, dan DPRD Pekanbaru memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif. Mereka menggunakan sistem

komunikasi terpadu untuk berbagi informasi secara *real-time*, sehingga setiap tindakan yang diambil selalu berdasarkan informasi terbaru.

### **Pertemuan Rapat**

Pertemuan rapat adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah, agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tentu dalam rangka kerja sama yang tetap. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan strategi baru dalam penanganan aksi balap liar. Pertemuan ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat segera menyesuaikan langkah-langkah mereka.

### **Pembagian Tugas**

Pembagian tugas yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Dalam menangani aksi balap liar, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas infrastruktur dan melakukan patrol dalam penanganan aksi balap liar. Satlantas Polresta bertanggung jawab atas penegakan hukum di lapangan, termasuk melakukan patroli dan penangkapan pelaku balap liar.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul yakni Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **4.1. Koordinasi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dalam Penanganan Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023**

Koordinasi Pemerintah Daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur koordinasi baik secara vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia<sup>2</sup>.

Adapun dalam koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap penanganan aksi balap liar, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi untuk mengetahui sejauh mana koordinasi antara instansi tersebut, sebagaimana yang dikatakan Harold Knootz dan Cyril O'donnel sebagai berikut:

##### **4.1.1. Kerja sama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru**

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi akan dapat tercapai dan terjalin jika terjadi hubungan yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapai koordinasi, hasil

akhir dari komunikasi adalah tercapainya koordinasi yang berdaya guna<sup>3</sup>.

Kerjasama antara Satlantas Polresta dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjadi fokus utama dalam upaya menangani masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas, khususnya terkait dengan aksi balap liar di wilayah tersebut. Adapun tindakan koordinasi dan Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru adalah:

##### **a. Rapat Koordinasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa saja permasalahan yang ada di luar sehingga mencapai kesepakatan bersama untuk sama-sama menekan aksi balap liar yang memang mayoritas pelakunya banyak dari usia muda atau kalangan pelajar.

##### **b. Patroli Gabungan**

Satlantas Polresta Pekanbaru telah mengadakan patroli gabungan bersama Dinas Perhubungan untuk menangani aksi balap liar secara lebih efektif. Patroli dilakukan pada saat malam hari di akhir pekan atau liburan di jalan-jalan tertentu yang sepi. Kerja sama patroli ini melibatkan personel dari anggota Kepolisian dan anggota Dinas Perhubungan. Pemantauan melalui CCTV juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. CCTV terpasang di berbagai titik kota. Informasi yang diperoleh dari CCTV kemudian diteruskan ke Satlantas untuk tindakan lebih lanjut, guna meningkatkan efektivitas penanganan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

##### **c. Penataan Infrastruktur**

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru telah bekerja sama mengambil

---

<sup>2</sup> Maldini, R. (2022, Juli). Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Limbah Peternakan Babi Di Kecamatan Siak Hulu – Kabupaten Kampar. *Jom Fisip*, 9.

---

<sup>3</sup> Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu. (2019, februari). *jurnal registratie*, 1, 61-78.

tindakan preventif dalam penataan infrastruktur dengan memasang pita penghadang di beberapa titik strategis, yang bertujuan untuk memperlambat kendaraan yang melewati area tersebut dan dengan demikian mengurangi potensi aksi balap liar di ruas jalan yang rawan tersebut. Dengan langkah preventif ini, pihak berwenang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru serta mengurangi risiko balap liar yang berpotensi merugikan masyarakat dan infrastruktur jalan.

d. Penyuluhan

Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru secara rutin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru. Dalam penyuluhan edukasi yang disampaikan oleh Kasatlantasi yakni tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan penekanan tentang larangan membawa kendaraan di bawah umur.

Melalui pendekatan edukatif ini, pihak Satlantasi Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berharap dapat menanamkan nilai-nilai keselamatan dan tanggung jawab sejak dini, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan aksi balap liar di Kota Pekanbaru.

e. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat Kota Pekanbaru secara aktif menyampaikan pengaduan mengenai aksi balap liar kepada Satlantasi Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pengaduan ini mencakup informasi tentang lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, waktu-waktu rawan, serta perilaku pengendara yang mengancam keselamatan umum.

#### **4.1.2. Komunikasi yang Baik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantasi Polresta Pekanbaru**

Bentuk dari komunikasi yang dilakukan dalam penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru ini adalah komunikasi publik yaitu suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Dalam bentuk komunikasi yang publik pada penanganan aksi balap liar ini adanya pertemuan rapat di dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Forum LLAJ Kota Pekanbaru.

Dalam teori komunikasi yang baik, peran representatif dan komunikatif DPRD Kota Pekanbaru menjadi sangat penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keresahan akibat aksi balap liar di kota tersebut. Sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan suara rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluhan dan kekhawatiran masyarakat di respons dengan tepat oleh pemerintah dan instansi terkait.

#### **4.1.3. Pertemuan Rapat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantasi Polresta Pekanbaru**

Forum LLAJ Kota Pekanbaru yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023 di Aula Gaharu Hotel Furaya, Satlantasi Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengadakan diskusi mendalam mengenai strategi penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru. Hasil dari diskusi ini mencakup beberapa langkah strategis yang telah disepakati bersama. Pertama, akan meningkatkan patroli gabungan dan pengawasan di lokasi-lokasi rawan yang sering menjadi tempat balap liar. Kedua, akan melakukan penataan infrastruktur jalan guna mendukung upaya penanggulangan balap liar. Ketiga, akan mengintensifkan program edukasi dan

kampanye keselamatan berlalu lintas di kalangan masyarakat. Keempat, akan melibatkan aktif masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan balap liar.

#### **4.1.4. Pembagian Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru**

Dalam upaya penanganan aksi balap liar di Kota Pekanbaru, pembagian tugas antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru dilakukan secara terstruktur dan efektif. Berikut adalah pembagian tugas Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Satlantas Polresta Pekanbaru
  - a. Tilang dan Penahanan Kendaraan
  - b. Patrol dan Pengawasan
  - c. Sosialisasi ke Peserta Didik Sekolah
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
  - a. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur
  - b. Pengawasan dan Pemantauan
  - c. Patroli Gabungan

#### **4.1.5. Faktor penghambat dalam Penanganan Aksi Balap Liar**

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam penanganan aksi balap liar, antara lain:

1. Kurangnya komunikasi efektif
2. Pembagian tugas yang tidak jelas
3. Tidak adanya regulasi yang mengatur

Untuk mencegah aksi balap liar di Kota Pekanbaru, koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Pekanbaru dapat melibatkan beberapa langkah strategis:

1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas
2. Patroli gabungan dan pengawasan rutin
3. Pemasangan rambu dan alat pembatas kecepatan
4. Kampanye di media sosia

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil diatas yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang bagaimana koordinasi pemerintah dalam penanganan aksi balap liar di kota Pekanbaru tahun 2022-2023, maka penulis menarik kesimpulan bahwa upaya koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan DPRD telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi aksi balap liar, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat rutin, patroli gabungan, serta sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Dukungan DPRD dalam bentuk pengesahan peraturan daerah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan aksi ini. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal frekuensi rapat, pelibatan lebih banyak pihak, serta penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih untuk memastikan keberlanjutan penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.

### **5.2. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru meningkatkan frekuensi dan efektivitas rapat rutin mereka dalam menangani aksi balap liar di Kota Pekanbaru. Rapat-rapat ini harus dilakukan secara teratur untuk membahas evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai, mengidentifikasi tantangan baru yang muncul, serta merumuskan strategi baru yang lebih efektif.
2. Perlu adanya langkah-langkah tegas dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar. Hal ini mencakup penindakan

- yang lebih aktif terhadap pelaku balap liar, penerapan sanksi yang lebih berat, dan upaya pencegahan yang lebih proaktif. Dengan demikian, akan tercipta efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku dan calon pelaku balap liar.
3. Koordinasi yang intens antara Dinas Perhubungan dan Satlantas juga harus ditingkatkan, termasuk pemanfaatan teknologi dan data yang lebih efektif untuk mendukung operasional lapangan. Implementasi strategi seperti penggunaan CCTV dan analisis data untuk pemetaan lokasi dan pola aksi balap liar juga perlu diperkuat, sehingga penanganan terhadap kasus-kasus balap liar dapat dilakukan dengan lebih presisi dan efisien.
  4. Penanganan aksi balap liar melalui sosialisasi ke sekolah yang dilakukan oleh kepolisian harus lebih diutamakan di daerah-daerah yang rawan terjadi balap liar dengan melakukan kerjasama dan koordinasi bersama masyarakat guna meminimalisir adanya aksi balap liar yang sering terjadi di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan E-Book

- Febrian, R. A. (2020). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan.
- Koontz, Harold dan Cryil O' Donnel. (1989). *Essential of Management*. MC Graw Hill Book Company : New York
- H.Ahyar. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . CV.Pustaka Ilmu Group.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen : Dasar,Pengertian dan Masalah* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Konseptual*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV. Alfabeta.
- Syafrudin, A. (2008). *Pangaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*.
- TK.IV, D. K. (2014). *Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta: Pusdikmin Lemdiklat.

### Jurnal

- Auliasari, A. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive*, 11.
- Fadillah, N. (2021, Juni). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. *Journal Of Philosophy*, 2.
- Fatahilah, A. B. (2019, Februari). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu. *Jurnal registratie*, 1, 61-78.
- Karincha, D. S. (2019). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan Air Putih. *eJournal Administrasi Negara*.
- Komang, N. (2021). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja. *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu*. (2019, februari). *jurnal registratie*, 1, 61-78.
- Maldini, R. (2022, Juli). Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Limbah Peternakan Babi Di Kecamatan Siak Hulu – Kabupaten Kampar. *Jom Fisip*, 9.
- Putra, R. A. (2021, Januari). Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019. *Jom Fisip*, 8.

- Rokhim. (2023). Peranan Kepolisian dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar Studi Kasus Jalur Pantura Kabupaten Demak.
- Rusandi. (2021, Juni). Jurnal Pendidikan dan Studi Islam.
- Santoso, C. (2020). Manajemen Pengaduan Masyarakat di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kota Semarang.
- Suhendi, D. (2019, Maret). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Jurnal Tatapamong, 35-47.
- Sutrisni, N. K. (2020). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja.
- Syahfitri, N. N. (2022). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap liar (Studi kasus remaja di Jalan Stadion Batu Canai Indragiri Hulu).
- Wirasyafri. (2023, April). Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Jurnal, Ilmu, Sosial Dan Hukum, 2, 101-106.
- Wulandari, D. (2018, Desember). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). Jurnal Al-Dustur, 1.
- Yuliartini, N. P. (2017, Agustus). Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja. Jurnal Widya Laksana, 6.
- Zubair. (2015). Kolaborasi Pemerintah Dengan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai. Jurnal Administrasi Publik, 1.
- Awalla, Yafet (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.
- Febrian, Ranggi Ade. (2020). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis).
- Fatahilah, Ade. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 7.
3. Peraturan Kabaharkam Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017

#### **Media Online**

- Kompas.com. (2022, September 15). Resahkan Warga Pekanbaru, Polisi Amankan 55 Sepeda Motor Balap Liar. From <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/182841378/resahkan-warga->
- Kurniawan, M. (2023, Oktober 30). Pita Kejut Dipasang di Sejumlah Titik ini, Untuk Cegah Balap Liar di Pekanbaru. From BatamNews: <https://www.batamnews.co.id/berita-105530-pita-kejut-dipasang-di-sejumlah-titik-ini-untuk-cegah-balap-liar-di-pekanbaru.html>
- Rinaldi. (2023, Juni 16). Satlantas Polresta Pekanbaru Prakarsai

FGD Pencegahan Balap Liar.  
From RiauPos.co:  
<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253586138/satlantas-polresta-pekanbaru-prakarsai-fgd-pencegahan-balap-liar>

Ristania, Y. (2023, Januari 30). Dishub Pekanbaru Bakal Koordinasi Dengan Satlantas Tindak Balap Liar. From RiauOnline: <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/01/30/dishub-pekanbaru-bakal-koordinasi-dengan-satlantas-tindak-balap-liar>